

## Lampiran 1

Transkrip hasil wawancara dengan Mochamad Riyanto  
Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Selasa, 23 Juni 2011 Pkl. 12.10 – 12.47 Wib di Kantor Komisi Penyiaran  
Indonesia

H : pak, eh.. penelitian saya ini judulnya Lembaga Penyiaran publik TVRI di tengah konglomerasi televisi komersial, jadi untuk saya untuk pake paradigma kritis pak

MR : saya punya paper itu sebentar yang LPP publik ditengah-tengah persaingan usaha tapi saya lebih banyak ke normatif karena memang, karna kapasitas saya adalah sebagai regulator dan pengawas di bidang undang-undang, jadi saya lebih ke tingkatan normatif yang lebih menonjol. Jadi Kembali kepada persoalan LPP public, positioning nya jelas sesuai dengan undang-undang penyiaran, pertama dia memang merupakan bagian dari asset publik, artinya dari aset itu kepemilikan secara tidak langsung adalah menjadi kepemilikan publik. Yang namanya saja Lembaga Penyiaran Publik, dan sebenarnya lembaga penyiaran publik itu diposisikan sebagai media yang mem-balance peran lembaga swasta dan dominasi peran lembaga swasta dari segi perspektif, mainstream, pengaturan sistim penyiaran, tapi dari segi karakter memang dari broadcast sistem sendiri itu berbeda dengan lembaga penyiaran swasta mulai dari program, siaran, mulai dari manajemen, struktur organisasinya yang jadi persoalan didalam ditengah kompetisi penyiaran adalah konten, dan konten yang mempunyai values, sebenarnya LPP TVRI lebih terfokus kepada konten yang menjamin informasi masyarakat yang valid dan aktual, dan program siaran yang sehat, jadi tanpa ada intervening aspek komersial dibanding dengan lembaga penyiaran swasta.

H : contoh bentuknya seperti apa?

MR : ya contohnya seperti lembaga penyiaran swasta contohnya news dikelola secara infotainment, yang belum tentu valid informasinya dan narasumber dan sebagainya, tapi etika etika penyiaran belum terlalu dijamin, tapi kalo publik harusnya tidak begitu ya toch. Sekarang kan ada fenomena nih news dirubah, dikembangkan menjadi bentuk news-tainment, nah itu gimana, apakah betul dijamin tentang informasinya narasumber, validasi, objektivitas informasinya, yang kedua, lembaga penyiaran swasta lebih cenderung membangun satu bentuk framing business yang punya values untuk kepentingan masyarakat kepentingan kekuasaan itu yang nga boleh

H : bagaimana pengaruh campur tangan KPI, terhadap yang nomor dua tadi.

MR : Campur tangan KPI ada dua nih, pertama adalah berbasis pada pendekatan hukum (law enforcement), kedua adalah mengedukasi mereka karena memiliki tugas dalam undang-undang, pengembangan SDM, dan etika broadcast. Itu salah satu tugas kami, kami akan masuk melalui kewenangan itu bisa kita lakukan, dalam pasal 8F ini menyusun perencanaan pengembangan sdm dalam konteks apa, dalam konteks 4 jasa dibagi 4 karakter, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komoditas, lembaga penyiaran berlangganan, harus orientasinya kesana, ini salah satu tugas dan kewajiban KPI,

kami masuk dari sini, disini akan menyentuh program, dari mulai memasukkan etika jurnalistik.

H : tapi dari kutipan bapak, tajuk yang bapak kasih pendapat, bapak serahkan lagi ke depkominfo

MR : oh nga jadi begini, kewenangan itu ada di kominfo menurut PPnya, yang memberikan license perijinan ada di kominfo dan bapepam, KPI itu disini hanya sifatnya membantu klo bisnis ya membantu bidang infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan usaha yang sehat antara Lembaga penyiaran dan industri terkait, tapi hanya kewenangan tugas membangun, jadi kami td nya ada dua hal yang akan kami ambil, pertama memberikan keputusan, yang kedua memberikan pandangan hukum, akhirnya kami memilih memberikan pandangan hukum, bahwa itu ada potensi pelanggaran, ini hasil diterima oleh kominfo, kominfo berdasarkan sumber ini memutuskan lain, kami gak boleh mengatakan itu gak bener, gak diijinkan gak boleh kan gitu menurut kewenangan kami sesuai dengan undang-undang jadi kami ingin membangun aja, Cuma kami tidak diberikan privilange hak otoritas yang penuh yang absolute terkait dengan ijin tidak bolehnya satu satu lembaga kalau melakukan akuisisi, tapi bukan berarti kami tidak bisa melakukan intervensi, melakukan sesuatu pengawasan itu law enforcement ada dua, pertama melakukan peringatan dalam sistem hukum itu, mengingatkan, menyadarkan, tugas eksekusi penegakan hukum di pihak lain.

Jadi antara undang-undang kominfo, kewenangan kominfo, undang-undang bapepam, dan undang-undang penyiaran harus ada mediasi, jadi kami melakukan mengingatkan pada publik ini ada kesalahan, dalam konteks membantu membangun iklim yang sehat

H : kita balik lagi ke TVRI, ini kan tahun terakhir, dewan pengawas sudah selesai, apakah TVRI sebagai LPP telah menjalankan fungsinya sebagai TV publik, kenapa pak?

MR : belum, banyak hal, pertama masih ada persoalan internal, jenis kelamin TV publik itu apa, jadi dari beban anggaran yang mau dibangun, kalo kita lihat, dalam tubuh anatominya TVRI, tangan pemerintah ada, tangan swasta ada, tangan publik ada. Itu gak boleh seharusnya.

H : tapi kan sudah diatur dalam undang-undang penyiaran bahwa TV publik, dalam pasal 14 TVRI adalah TV publik, klo bapak katakan ada tangan pemerintah dan swasta itu bentuk nya seperti apa

MR : contohnya begini, pegawai negeri, dari struktur organisasi kelembagaan dulu, satu mulai dari pegawainya itu kan belum jelas statusnya masih ada pegawai pemerintah masih ada pegawai ya seperti itu, kedua anggarannya masih mayoritas APBN ini parameter yang jelas dulu saya katakan. Jenis kelaminnya gak jelas nich, padahal filosofinya publik milik masyarakat di biayai masyarakat sendiri, klo di negara amerika. Prosentase pemerintah hanya memberikan support, hibah tidak lebih dari 20 % di indonesia nga klo orientasi secara kelembagaan sekarang karakter program harusnya, dulu kebetulan saya pernah ke ketua KPID jawa tengah, saya membuat prototype RRI dan meminta TVRI, bagaimana proses program TVRI diproduksi kalau itu berkarakter LPP, saya membuat, anda harus dialog kepada publik minta masukan publik terhadap program siaran yang akan anda rencanakan melali media anda. RRI juga sama, dulu hanya direncanakan

oleh internal mereka, tanpa mempertimbangkan publik, harusnya bekerja dengan publik meminta masukan, karna milik mereka, itu yang saya lakukan, ada forum dengan lembaga penyiaran swasta namanya publik lokal, kita kumpulkan, jadi KPID bukan hanya duduk di meja kenakan sanksi, kami punya kewajiban menggandeng TV dari sisi program bukan mengintervensi tapi memberikan paradigma, mindset berpikir tentang program, saya dialog publik TVRI, melibatkan kampus dan masyarakat, cuma masih terbatas para akademisi. Belum mencakup masyarakat luas

H : kalau mencakup masyarakat luas, segmentasi apa yang harus diambil pak?

MR : inikan ada komentar masyarakat yang segmen program didalam analisis program ada strukturnya, ini segmen berpendidikan, berpekerjaan, yang namanya program drivement kan ada segmen nya. Umur kalangan muda, berpendidikan, berpenghasilan, itu segmen, itu harus digarap, jangan hanya berbicara kalau sudah lembaga pendidikan tinggi sudah mewakili lembaga publik, polarisasi itu tidak begitu, jadi mengolah polarisasi yang akhirnya tercermin dalam segmen itu, dan itu harus representasi, yang kadang-kadang orang luar lupa secara metodologis itu begitu, bahwa berbicara dengan perguruan tinggi, dianggap sudah mewakili publik, proposal program yang dia punya segmen, itu harusnya menjadi parameter, secara metodologis, ini intuisi saya berbicara dengan perguruan tinggi, belum mewakili segmen. Itu yang saya katakan, publik itu terbagi dalam struktur masyarakat namanya prismatic dalam teori sosiologis, kalo didalam program namanya segmen, ada pendidikan ada klasifikasinya. Semakin komplikat semakin kaya, dan itu yang diambil dalam formulasi.

H : jadi untuk 2012 ini harus ada dialog dengan masyarakat.

MR : Segmen sekarang, cari pegawai negeri, apa masukan anda tentang dialog televisi, besoknya cari pengusaha karir, apa yang anda inginkan dalam dialog politisi, ada masukannya gitu..

Saya mencari kelompok sma, harusnya begitu, dan akhirnya berbasis pada segmen, itu yang disebut representasi, jangan di generalisasi bahwa sesuatu itu sudah mewakili Pemegang saham untuk swasta, untuk pemegang usaha asing 20% di PP ada..trus ada pengaturan pemusatan kepemilikan, penguasaan ..... sekian persen saham di badan hukum 2-3 sampai sekian persen. Itu diatur supaya prinsip yang dianut undang-undang ini betul-betul terhubung, ini sebenarnya terjadi, tapi persoalannya bisnis penyiaran itu menjadi bagian pusat perputaran kompetitif yang luar biasa diantara TV, akhirnya mendorong untuk saling menguasai dan monopoli, karna ini menjadi pusaran kompetitif. Akhirnya regulasi menjadi diabaikan, dia membentuk jaringan dan akhirnya mengembangkan untuk go public, supaya lebih mudah me-recall capital, untuk menguasai televise sampai di lokal..... pemasok investasi kepada lembaga penyiaran, akhirnya go public. Kalo tidak ada frekuensi tidak mungkin laku, padahal adalah milik publik, gak adil dong, gak fair kalau anda berdagang sepatu, property itu boleh-boleh saja, kalau anda tidak punya TV, itu tidak akan laku. Karna ada values, secara ekonomi menguntungkan, ini yang harus kita bicarakan, ini yang tidak ada kepastian hukum yang jelas tentang transaksional, dia mengatakan saya bisnis dengan IPO, Tbk sekarang bisnis sendiri. Yang bilang tidak bias siapa, kalau anda

tidak punya TV tidak ada frekuensi tidak akan laku. Karna disitu ada prospek, ada orientasi bisnis yang luar biasa ada profit, klo tidak ada frekuensi bagaimana? Lupa kalau frekuensi milik Negara, dikasih batas 10 tahun, maksimal, belum tentu 10 tahun dapat diizinkan kembali, tidak bersifat permanen. Beda kalau dalam investasi kerjasama asing yang batas waktunya 15-30 tahun

H : pengaturan frekuensi terhadap frekuensi bagaimana?

MR : kalau frekuensi ada di Kominfo, karna PP , karna undang-undang telekomunikasi, tapi sebenarnya KPI adalah lembaga independen yang mengatur lembaga penyiaran termasuk frekuensi, harusnya begitu. tapi kan tidak terjadi, oke itu menjadi ranah Negara karna yang punya komitmen adalah Negara, bukan KPI, tapi secara teknis diatur oleh KPI, itu yang diatur oleh undang-undang, tapi yang terjadi kan tidak. Kewenangan pemerintah dipertahankan untuk masuk dalam tafsiran undang-undang ini jadi bisa salah, karna kembali kepada soal pemusatan kepemilikan, jadi kecenderungan itu tetap ada, yang mendorong monopoli itu adalah karna pusaran di titik ini sangat kuat sekali kompetitifnya, siapa yang mempunyai modal besar dialah yang menguasai pasar, filosofis bisnisnya begitu, akhirnya kecenderungan untuk share, dan menjadi corporate, menjadi beberapa televisi digabungkan, ini sebenarnya, tidak boleh terjadi. Akhirnya dia monopoli di daerah, kalo satu televisi menguasai 99% titik di propinsi ini, bisa tidak dia men-driven public opinion untuk kepentingan mereka, ya jadi kita harus membatasi, secara tegas, lugas. Seperti fenomena akuisisi itu tidak boleh terjadi karna bertentangan dengan undang-undang ini, makanya KPI punya pandangan hukum itu.

H : Ada undang No 5 tahun 1999, membatasi juga soal seperti itu..

MR : Ia tapi kalo di siaran tidak masuk, kan saya kebetulan yang menjadi juru bicara dari KPI yang membahas soal persaingan usaha, saya juga sepakat, karena memang kasus RCTI dianggap monopoli itu karena dia tidak menguasai pasar, jadi tidak sampai 50%, ..... iklannya terserah aja kan. Ini yang pusing kita.

H : Gimana itu pak, artinya yang bisa membuka peluang.

MR : ya bisa saja seperti itu faktanya, ini karna penafsiran undang-undang, misalnya sebenarnya menurut undang-undang penyiaran, Nanti ada baca, hal-hal yang menyangkut izin, kepada pemohon pengajuan akuisisi, khusus untuk broadcast harus mempertimbangkan undang-undang, dalam hal ini undang-undang penyiaran, itu tugas bapepam disini, saya pernah baca, ada teori oleh Edwin Miller, bapepam harus melihat ini, walaupun dia punya otoritas menurut undang-undangnya, ini kan persoalannya kalo mereka memahami harusnya mengerti itu.

H : contoh TKI ada kerjasama dengan Departemen tenaga kerja, dengan departemen luar negeri, kan sama dengan penyiaran pak, tapi visinya kan ini. Tapi kalo keluar dari ini sudah salah

MR : ia makanya kita mengatakan bahwa akuisisi berpotensi melanggar dan melanggar, nah sekarang yang memberikan izin itu mereka bukan kita. Harusnya undang-undang menyebutkan, undang-undang tidak mengatur hanya mengatur saja tapi tidak memberikan hak eksekusi apakah harus menunggu rekomendasi KPI, harusnya menunggu rekomendasi KPI, kalo mau mengatur, mereka tidak bisa. Ini kan hanya norma saja. Norma saja, yang tidak memaksa.

H : kebetulan saya ketemu dengan pak paulus mendiskusikan TVRI dengan KPI, mereka memang mengatakan harus ada revisi undang-undang lagi, karna mungkin undang-undang terlalu cepat.

MR : bukan terlalu cepat, memang akhirnya berubah secara ideal, banyak yang dikompromikan berbagai kepentingan, kepentingan industri, kepentingan publik, DPR. Nah itu tidak ada. Ya sudah KPI hanya bisa memberikan pandangan hukum, mencerahkan aja pada masalahnya, karna kami tidak diberikan hak untuk rekomendasi,

H : Masyarakat taunya KPI yang seenaknya mengambil keputusan, padahal tidak tahu.

MR : kami dituduh, ya kami tidak bisa eksekusi, memang tidak ada undang-undang untuk itu.

H : ada miss banyak ini pak.

MR : banyak persoalan kalo soal undang-undang penyiaran,

H : kalo kita bicara soal konglomerasi pak, kalo bapak lihat bagaimana TVRI ditengah konglomerasi ini pak.

MR : TVRI, ini kan persoalan, kita tidak usah terjebak dengan persoalan atmosfer atau pusanan kompetitif itu, harus lepas, sebenarnya kalo positioning, kita analogikan, ini ada bulan, ad planet-planet tapi kita harus tau secara gravitasi, secara hukum alam planet kita bagaimana.

## Lampiran 2

Transkrip hasil wawancara dengan Hazairin Sitepu

Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI

Selasa, 28 Juni 2011 Pkl. 12.00 – 12.44 Wib di lt.4 Kantor Pusat LPP TVRI

H : Pak hazairin Sitepu selamat siang pak, saya Herbert Marolop Sinaga saya dalam menyelesaikan S2 saya dengan judul tesis saya LPP ditengah konglomerasi media eh mungkin awalnya pertanyaan awalnya adalah bagaimana bapak melihat perubahan status TVRI dari awal TVRI berdiri sampai sekarang pak

HS : ah..... (lama) ... gmna gmna

H : Bagaimana bapak melihat perubahan status hukum eh TVRI sejak berdirinya TVRI sampai sekarang pak dari yayasan perjan persero sampe TV Publik seperti sekarang ini?

HS : ya tentunya TVRI ini dari awal tidak ini maksudnya eh.. Pemerintah terutama negara tidak konsisten didalam eh TVRI ini didalam melihat strukturisasi kelembagaannya, karena usia tvri sekarang saat ini sudah 49 tahun diindonesia ini usia yang panjang sekali dan Klo kita liat dari historinya bahwa tvri sebagai yayasan kan TVRI kemudian eh masuk lg ke dalam di bagian departemen penerangan ya di direktorat jendral RTF dan itu berlangsung sangat lama sekali eh kemudian dia mencoba lagi melakukan apa ya istilahnya ah.. apa ya.. eh.. melakukan eh.. uji coba lagi masuk lagi ke perjan (persejawatan) lalu masuk lagi ke persero. Jadi ini sangat tidak jelas lah dan tidak konsisten dan perubahan-perubahan bentuk kelembagaan ini justru juga merugikan tvri sendiri secara kelembagaan ya nah sekarang sebagai televisi publik menurut saya ini posisi yang tepat menurut saya ini karena ah.. posisi yang kita lihat didalam peraturan perundang-undang anda bisa lihat nanti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2002 dan PP 11 dan 13 itu sebetulnya posisi yang ideal untuk saat ini saya pikir ini eh rakyat indonesia menemukan positioning tetapi posisi ini sendiri kan kita kan masih dalam mencari bentuk eh tv publik sesungguhnya ala indonesia itu seperti apa ya kan. Kita ingin bercermin misalnya kepada ....(bunyi telepon) eh apa namanya ABC, BBC, NHK seperti apakah dengan mereka punya standar-standar ya mungkin ada juga standard standar universal tetapi kita ada standar-standar negara dan kita juga ingin menerapkan standar standard universal tetapi bagaimanapun culture Indonesia ini juga ikut di dalam standar standard itu nah ini kan belum eh dalam posisi sebagai tv publik ini yang terjadi adalah bahwa eh tvri ini tidak competitive saat ini ya ka , kenapa tidak kompetitif juga mungkin karena itu tadi atau mungkin juga karena eh posisi kelembagaannya yang selalu berubah-ubah sehingga culture lembaga itu juga menjadi tidak jelas sampai saat ini kita tidak mempunyai perfect culture ya Culturenya yang tidak kompetitif dan ini kan membuat tvri ini tidak bisa bersaing dalam hal apa saja tidak bisa bersaing ini masalahnya problem yang paling besar untuk saat ini.

H : kalau kita merujuk pada Undang-Undang No 32 tahun 2002 dan PP Nomor 11 dan 13 Sekarang TVRI telah berubah menjadi eh TV publik pak nah sekarang ini saya mau tanya pak TV Publik ini dibawah kementerian mana pak menurut pendapat bapak seperti apa?

HS : TV publik ini kan tidak didalam eh apa namanya eh apa namanya didalam peraturan perundangundangan itu tvri ini kan bersifat netral, independent dan tidak komersial. Jadi, netral, independen dan tidak komersial dan televisi ini independent dan tidak berdiri dalam department manapun. Karena televisi public ini langsung dibawah presiden sebagai kepala negara tentunya bukan sebagai kepala pemerintahan jadi pemerintah tidak bisa ikut campur didalam menentukan isi siaran TVRI jadi tidak dibawah kementerian manapun cuman karena karyawan kita ini sebageian besar adalah pegawai negri sipil dan kemarin itu juga terjadi perpindahan-perpindahan dari department penerangan, pindah ke departemen keuangan, dan sekarang pindah lagi ke departemen kominfo jadi PNS itu kan harus ada cantolannya nah maka nyantollah disana jd dan juga kita ini juga eh belum mandiri sebetulnya (rekaman habis) intinya masih belum ya meskipun kontent ini kita sudah di eh apa namanya kontent ini kemandirian kontent ini sebetulnya yang paling penting mempunyai sudah sejak dari awal kemandirian kontent ini krn ini yg paling inti kan bagaimana kemandirian dr kontent tvri itu sendiri sehingga tidak ada siapapun yg ikut didalam mencampuri urusan kontent tvri kecuali dewan pengawas dan dewan direksi kan diatur didalam peraturan itu sendiri.

T : Tapi pak pertanyaannya pak Jika kita merujuk pada pemilihan dewan pengawas berikut ini yg kedua ini bapak adalah yang pertama itu kenapa harus masih eh dipilih oleh kementerian depkominfo pak?

J : Karena didalam peraturan itu peraturan pemerintah itu disebutkan bahwa dewan pengawas itu adalah eh apa namanya eh mewakili apa namanya mewakili eh masyarakat, pemerintah, dan lembaga penyelenggaraan publik sendiri TVRI. Kemudian didalam proses recruitmentnya itu dia eh apa namanya mereka itu diangkat atas usulan pemerintah dan usulan masyarakat ya kan maka mekanisme itu oleh pemerintah, pemerintah menyeleksi eh dalam tahapan tertentu misalnya eh dulu itu menyeleksi sampe 15 nama ya kan kemudian eh dengan segala indikator-indikator yang mereka punya, eh segala instrumen-instrumen yang mereka punya kemudian 15 nama ini diserahkan ke DPR yang kemudian di fit and proper test dalam peraturan kan diatur di fit and proper test di DPR dan DPR kemudian diberikan kepada presiden untuk diangkat oleh presiden melalui keputusan presiden.

T : Apakah itu tidak termasuk tekanan-tekanan politik dari pemerintah pak?

J : ah sebetulnya juga tidak pengalaman kita selama ini selama pengalaman ini eh saya boleh mengatakan bahwa intervensi pemerintah itu relative eh saya sebut eh tidak ada relative tidak ada maksudnya dalam hal apa saja ya maksudnya eh ya dimanapun juga kepentingan pemerintah itu selalu ada tetapi Intervensi kepentingan beda dengan intervensi kan eh intervensi dalam artian pemerintah itu mencampuri urusan kebijakan konten itu sampai hari ini tidak ada. Kontent kita juga belum bagus koq kontent kita juga belum bagus kemudian eh apa eh pemerintah juga tidak didalam posisi eh memaksakan kehendak ketika kita misalnya memilih dewan direksi misalnya itu juga tidak klo ada misalnya dari DPR ya oknum-oknumnya DPR tetapi secara kelembagaan tidak tp oknum-oknumnya ada

T : ok pak sekarang saya kita kembali ke LPP pak saat ini saat ini apa permasalahan yang dihadapi oleh LPPP TVRI pak?

J : Dulu kita menghadapi masalah semua semua hal, yaitu aspek SDM, kemudian aspek keuangan, aspek teknologi kemudian manajemen ya semua mempunyai masalah yg kadarnya kurang lebih sama semua tetapi dalam 5 tahun kita sudah mencoba apa menaikkan pendapatan TVRI melalui pendapatan APBN dan pendapatan non-APBN. Pendapatan APBN ini sudah naik dari 260 milyar klo tidak salah pada tahun 2006 dan skrg sudah mengalami kenaikan per2011 ini anggaran yang kemarin itu adalah sudah menjadi 660 sekian milyar 660 sekian milyar, terjadi kenaikan lompatan yang begitu besar dan nanti dalam anggaran tambahan ini juga kemungkinan akan naik lagi karena presiden sudah menjanjikan 1 triliun tahun ini akan naik lagi kemudian anggaran pendapatan non-APBN kita juga mengalami kenaikan dari dulu kurang lebih dari 50 milyar pertahun sekarang ini sudah diatas 200 milyar pertahun.

T : bukankan itu tidak terealisasi pak?

J : 200 milyar pendapatan non-APBN kita memang adanya peningkatan dari tahun 2006 kurang lebih 50 milyar ya itu realisasi koq jd perkembangan-perkembangan terkahir itu kita sudah diatas 200 milyar per tahun (perkembangan terakhir)

T : Saya mempunyai data non-APBN TVRI dari tahun 2006-2010, itu malah turun pak?

J : ehm kantor pusat ya anda mengambil seluruhnya TVRI seluruh indonesia ya kantor pusat turun malah anda melihat pendapatan itu anda mengcover seluruh 27 stasiun lokal anda akan menemukan angka-angka disitu ehm ini mengatakan bahwa masalah keuangan bisa kita atasi uang itu bisa dicari artinya kan dan kemudian dulu teknologi kita dulu kan berantakan, teknologi kita ada 376 stasiun satuan pemancar diseluruh Indonesia tetapi lebih dari 50% dari seluruh 376 satuan itu dalam keadaan rusak tersebut mengalami kerusakan (mati, ga bisa diapa-apain), nah yang tinggal itu kurang dari 50% lainnya lebih dari 50%nya mengalami daya pancar yang sangat rendah turunnya rendah sekali anda mengerti maksudnya nich misalnya 10 kilo tinggal 1 kilo saja dr 2 kilo tinggal 100 watt saja ini problem besar waktu itu nah sekarang problem itu menghasilkan kontribusi negative, dan kita hanya bisa. Sekarang ini kita sudah bisa mengcover lebih dari 32% wilayah indonesia 32 % dan kita hanya bisa mengcover 28% populasi Indonesia nah sekarang ini kita sudah bisa mengcover lebih dari 35% wilayah dan kita sudah mengcover 64% populasi ya kan nanti anda bisa mengambil datanya nanti ya ini juga mencerminkan bahwa teknologi itu bisa kita beli bisa kita adakan klo ada uang kita bisa beli dan bisa mengcover 100% bisa nah Problem yang paling penting adalah dari urutan satu yg kedua pertama adalah problem yang paling besar ya yg pertama adalah SDM ya, yang kedua juga SDM ya dan yg ketiga juga SDM nanti yang keempat baru manajemen. Betapa besarnya problem SDM itu anda melihat di TVRI ini kan anda melihat teman-teman anda kerjanya kayak apa? Moralitas, mentalitas dan profesional dimana?" uang yang kita kasih lebih banyak dikorup daripada dipake untuk kepentingan layar kan gitu kan Kenapa SPN (Selamat pagi Nusantara) kita berhentikan anda tahu kita

berhentikan karena lebih besar uang yang dimalingin daripada untuk kepentingan layar nah itu jadi eh

T : Jadi yang saya kutip dari sini dari pernyataan bapak, jadi tidak ada kontrol donk?

J : Itu yang saya bilang masalah manajemen td, karena dalam manajemen tersebut terdapat SDM yang mengontrol. Jadi walaupun sudah di control tapi jika SDM tersebut tidak mempunyai mentalitas dan moralitas profesional kerja, maka hal itu akan terjadi ya ini karena sudah amburadul. Tidak punya corporate culture kita nich jadilah seperti itu. Saya sebutkan pertama SDM kedua SDM yang ketiga SDM baru yang keempat Manajemen merupakan masalah ke empat karena manajemen merupakan alat yang dipakai untuk bagaimana memmanage mengatur pekerjaan yang ada. Bagaimana kita menunjuk orang manajemen itu bekerja secara profesional tetapi manajemen kita kadang-kadang kembali kepada feeling sedangkan feeling kita juga yang kualitas feelingnya rendah

T : sekarang pak apakah TVRI publik ini sudah telah menjalankan fungsinya sebagai televisi publik?

J : Kita akan mencoba untuk konsisten dalam merealisasikan ya fungsi, misi dan visi publik TVRI. kita mencoba melaksanakan itu sifat netral independen dan tidak komersial itu kita tetap melaksanakan itu, tetapi fungsi tadi sebagai media edukasi, sebagai media informasi, sebagai media hiburan dan media kontrol sosial dan sebagai perekat kultur misalnya kita juga mencoba tetapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. " kita Lihatlah layar kita ini ini isinya apa masih jauh sekali kita lihat apa namanya orang-orang kita belum mencerminkan misalnya Kita baru mencapai 40% dari 100% yang diharapkan, ya jadi masih sangat jauh. eh hiburan kita seperti apa kualitasnya? Artisnya siapa ditampilkan? Apakah orang nonton nah itu td mentalitasnya kita kasi anggaran untuk artis kelas 1 tetapi malah dipakai untuk artis kelas 2, 3 ataupun 4 nah itu kan itu mentalitas SDM SDM dan SDM ya..

T : Pak bagaimana anda melihat tekanan pasar dalam persaingan dunia siaran saat ini pak?

J : Saya pikir pasar ini menjadi apa ya pasar ini telah mencoba mendrive semua kepentingan ya pasar ini kan sebetulnya eh apa namanya pasar ini telah mengkapitalisasi semua perhatian semua energy untuk kepentingannya untuk kepentingan pasar. Kalo temen-temen yang swasta orientasinya adalah ..... mereka mencoba mengkapitalisasi dan mencoba melihat memanfaatkan semua peluang pasar yang ada dan nah kita kadang-kadang terjebak akan hal itu, terjebak dalam permainan pasar. Tetapi sebenarnya pasar itu memang penting. Kenapa? Karena kita tidak boleh anti pasar kita tidak harus anti pasar karena yang menentukan adalah pasar, jangan sampai generasi kita menyimpang dari selera pasar. Tapi sebenarnya kita juga bisa menciptakan pasar sambil kita itu mencoba memenuhi selera pasar tetapi kita juga mencoba menciptakan pasar nah itu kemampuan kita untuk menciptakan pasar ini susah sulit karena tadi kita harus benerin SDM yang kualitasnya sangat redah kemudian kadang-kadang kita terjebak dlm kepentingan pasar sehingga yang kita kejar adalah kepentingan industrinya ya kan karena TVRI ini kan sangat tidak pada kepentingan industri sebetulnya ya kita bagaimana untuk mendapatkan kepnetingan publik sebesar-

besarnya jadi benefit apa yang kita bisa sajikan kepada publik ya kan begitu karena itu adalah hak dia. Itu menjadi hak publik untuk mendapatkan informasi untuk mendapatkan tayangan yang berkualitas dari TVRI gitu kan tetapi yang kita sajikan masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan akibat yang memeperlihatkan kejelekan-kejelekan dan menjadikan TVRI sebagai stasiun TV yang paling rendah.

T : Dari 27 Juni 2006 sampai saat ini 2011 bagaimana bapak sebagai ketua dewan pengawas mengatasi SDM SDM kita ini.

J : Pada awal-awal kita sudah mengadakan audit SDM tetapi ternyata kan disini disambutnya dengan sangat sikap skeptis sekali kan sedangkan kalo kita audit sdm itu sendiri untuk kita tahu dan kita bisa menentukan kompetensi masing-masing karyawan agar cocok untuk ditempatkan diposisi mana tanpa itu susah. Audit ini baru dijalankan tahun kemarin ini, tapi ternyata hal tersebut bukan audit tetapi baru pemotretan potensi SDM kita saja. Nantinya pada tahun 2012 baru boleh diadakan audit, ini lama sekali ini berarti terjadi kemandekan di manajemen kan nah ini masalahnya susah. Saya nga tau kualitas anda seperti apa tapi klo diauditkan jadi tahu oh anda ini pantasnya disini gitu loh anda bukan disana gitu..

T : TVRI berdiri sendiri tidak dibawah kementerian tetapi pada tahun 2010 TVRI telah menerima calon pegawai negeri sipil. Apakah itu ada keterikatan TVRI sebagai TV publik dengan depkominfo?

J : Persoalan TVRI tidak mendapatkan kuota PNS karena org sini kan karena sebenarnya orang di TVRI hampir semuanya PNS. Sebenarnya kita tidak dapat kuota PNS maka kita minta tolong PAN kedepkominfo yang punya kuota supaya dialah yg kominfo itulah yang meminjamkan ke TVRI. Tetapi sebetulnya menurut saya, TVRI ini bukan tempat PNS tetapi tempatnya profesional. Oleh karena itu saya dari awal meminta karyawan TVRI menjadi karyawan LPP yang nantinya semuanya itu kembali kepada kulaitas apakah dia PNS atau pun bukan PNS tetapi melihat kualitas. “ anda tahu bekerja saat ini siapa sekarang yang bekerja di TVRI? Itukan Anak-anak yang kontrak itu kan? Anak-anak baru. Yang usia kerja diatas 10 tahun Coba tanya kepada orang-orang yang sudah 20 tahun bekerja, berapa persen yang bisa produktif?. Ini yang menjadi masalah sebenarnya menjadi masalah. Bagaimana sistem bagaiman semua orang dapat memahami termaksud pemerintah ttg TVRI itu sebenarnya seperti apa sih? 5 tahun ini TVRI berkendala akan itu karena persepsi pemerintah agak berbeda DPR berbeda dalam melihat TVRI temen-temn diswasta Teman- teman TVRI juga mempunyai persepsi yang salah. Mereka menganggap sebagai PNS sehigga mereka mendapat kesejahteraan PNS klo bukan PNS kita gunakan gaya profesional ya kan gitu profesioanl pasti lebih baik dari PNS

T : pak Bagaimana pengaturan keuangan APBN dan non-APBN untuk menjadikan TV ini sebagai TV publik?

J : Keuangan sumber-sumber itu yaitu APBN kita penentuannya melalui mekanisme departemen keuangan kan, DPR dan hal ini melalui rencana yang rinci betul jadi harus dipertanggung jawabkan. Non APBN itu juga harus melalui mekanisme TVRI tetapi harus selalu di audit oleh lembaga-lembaga audit tidak hanya BPKP tetapi juga BKP agar lebih terbuka dalam mengelola anggaran TVRI. Hal ini penting sekali eh karena besar kecil anggran TVRI ternyata tidak

memberikan efek yang besar terhadap perbaikan kualitas. Bandingkan anggaran pada tahun 2006 2007 kualitas yang diberikan seperti apa dengan anggaran saat ini dengan kenaikan hampir 200% tetapi anda bisa lihat berapa % kenaikan kualitas? Nah masalahnya terdapat pada hal tersebut.

T : Pak, RCTI dengan MNC telah akuisisi dan SCTV sudah mau akuisisi dengan Indosiar. Bagaimana bapak TVRI dapat merebut khalayaknya?

J : Kualitas isi siarannya kualitas kontennya kita harus memberikan hiburan yang berkualitas. Kulalitas itu tidak hanya artisnya yang berkualitas tetapi juga how to present nya. Kita tau bahwa how to present kita tidak berkualitas. Harusnya kita menyajikan dengan packaging yang seperti apa dan lain sebagainya. Kita harus membuat standar kualitas, misalnya berita itu standar layak siarannya seperti apa kita buat a b c berita-berita dari daerah itu kualitas rendah tapi tayang nasional..

T : Apakah ada utusan dari dewan pengawas untuk mengkaji itu?

J : Ada, sudah berkali-kali dewan pengawas meminta untuk membuat standar kualitas tetapi mereka hanya membuat SOP. Sedangkan SOP itu lebih menjelaskan bagaimana bekerja

T : Berdasarkan wacana tadi selama ini masih seperti itu. Apakah sudah sampai satu titik mereka tidak “dijewer”?

J : Dewan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Kita hanya bisa menyampaikan ke dewan direksi klo kita kasi keredaksi kan ributkan jadi memang TVRI tidak memiliki standar kualitas dan TVRI tidak mempunyai quality control. Selain itu mekanisme tidak berlaku di TVRI. “ Mana sangsi yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mematuhi aturan? Dan mana reward yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kualitas?” hal ini juga merupakan masalah.

T : Mengapa hal itu tidak diambil oleh dewan pengawas sebagai acuan untuk diajukan kepada dirut TVRI?

J : Sudah, tetapi ada masalah manajemen seperti yang sudah saya jelaskan

T : Apakah terjadi konflik di TVRI?

J : Sebetulnya bukan konflik tetapi mereka sudah terbiasa dengan culture lama yang begitu panjang dan tidak competitive. TVRI dahulu menjadi raja yang tidak mempunyai pesaing sehingga terbiasa dengan tidak memeperdulikan kualitas yang penting memiliki siaran.

### Lampiran 3

Transkrip hasil wawancara dengan Aldrin Gibion Panjaitan

GM. Akuntansi dan Perpajakan LPP TVRI

Senin, 25 Juli 2011 Pkl. 10.29 – 10.41 Wib di lt.7 Gedung GPO Kantor Pusat LPP TVRI

H : Saya lagi penelitian pak eh berjudul tentang lembaga penyiaran publik ditengah konglomerasi televisi komersial, TVRI sejak adanya undang-undang Nomor 32 tahun 2002 dan ditambah dengan PP Nomor 11 dan 13 tentang TVRI, TVRI telah berubah bentuk ke TV publik, bagaimana proses perubahan secara keuangan dari tvri secara persero ke tv publik menurut pak Aldrin gimana.

A : secara keuangan dari sisi mana nih

H : dari segi pengaturan keuangannya pak

A : oh ya kalo kita bicara keuangan kita bicara dua hal kan, sisi pemasukan dan sisi pengeluaran gitu ya akibat dari kita LPP ini otomatis kita punya dua sumber penerimaan berarti kan, sumber penerimaan APBN yaitu Anggaran pendapatan belanja Negara, dan sumber pendapatan dari non APBN, dalam PP 13 dinyatakan ada 5 point sumber pendanaan pertama APBN, iuran masyarakat, usaha yang sah terkait dengan penyiaran, kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama iklan, nah itu seperti itu perubahannya, tapi kemudian persoalan yang muncul di sisi pengeluarannya di akuntansi adalah, bagaimana pencatatannya, karena metode pencatatan yang dipakai di keuangan Negara dengan di pake di keuangan komersil gitu ya itu berbeda, klo di APBN itu kita pake cash basis namanya itu teorinya klo di non APBN itu actual basis nah itu kita punya dua jenis laporan keuangan, laporan keuangan yang pertama itu namanya SAI sistem akuntansi instansi pemerintah itu khusus pemakaian penerimaan dan penggunaan dana-dana APBN, kedua laporan keuangan komersil yang sifatnya mencakup APBN yang tadi, seperti itu saya kira

H : bagaimana bapak melihat perubahan dari TV persero dari TV publik, apakah ada peningkatan dari segi pendapatan APBN dan non APBN

A : saya kira nggak kontekstual ya klo pertanyaan seperti itu, karena itu gak ada hubungannya, kalo anda bicara soal peningkatan ada peningkatan tapi apakah karena tv publik atau tidak tv publik itu tidak relevan.

H : jadi apakah karena ada pengaruh dari manajerial TVRI yang berubah menjadi TV publik mungkin disayang oleh pemerintah, sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah, kan undang-undang adalah produk pemerintah pak aldrin

A : jadi begini, eh sori-sori, begini maksud saya kalo masalah peningkatan penerimaan, itu otomatis terkait dengan kinerja direksi sudah pasti, pimpinanlah lah ya semua dalam hal ini dewasa juga, direksi juga. Tapi apakah itu terkait dengan bentuknya sebagai TV publik, itu soal lain saya pikir gitu ya, tapi tidak bisa kita sangkal bahwa memang dengan kepublikan TVRI ini itu sedikit banyak ada pengaruh bagi pemerintah sebagai pemilik modal TVRI gitu ya maka sebagai kita LPP itu kekayaan TVRI itu tidak bisa dipisahkan dari keuangan Negara, jadi apa yang dimiliki TVRI juga dimiliki oleh Negara dulu ketika menjadi PT itu juga sama mungkin tetapi tidak secara langsung ya sekarang dengan LPP dia gabung keuangan negara gitu dalam hal ini kementerian keuangan

H : waktu itu pak waktu kita sempat berubah menjadi PT, sempat terjadi kekosongan pemasukan pendapatan dari APBN bagaimana itu

A : saya belum disini waktu itu, saya kira tidak ada kekosongan yah, paling-paling waktu itu kekosongan itu dalam arti kata untuk operasional tapi untuk gaji pegawai tetap ada kan kita pegawai negeri sipil kan

H : bagaimana bapak melihat APBN saya dapat informasinya naik memang tapi nga tau inflasinya berapa peningkatnya berapa saya belum cek, nah pertanyaannya adalah apakah pendanaan APBN ini dapat memberikan jaminan untuk TV publik ini maju atau bagaimana pak anda melihatnya

A : oh gini kalo kita bicara soal sukses sebuah televisi. Itu kan banyak factor, jadi salah satunya adalah keuangan itu pasti, tapi apakah karna banyak uang trus sukses belum tentu. Anda tahu bahwa disamping uang adalah SDM, kedua adalah faktor ee apa ya kepastian pekerjaan. Maksudnya gini eh Sebagai tv public memang kita tidak bisa memandang bahwa tv swasta sebagai Kompetitor nga bisa karna tujuannya berbeda, tv swasta sudah jelas motivasinya profit, ia kan, tapi kalo tv publik tidak, jelas di PP, kita sifatnya seperti BBC visi kita itukan sebagai pemersatu bangsa NKRI dan sebagainya. Jadi tv publik itu adalah untuk kepublikan, kadangkadang tanpa memperhatikan bahwa publik itu suka atau tidak gitu kan Yang kita majukan adalah masalah kepublikan, kita gak bicara masalah komersialitas disitu, gak boleh, jadi dua hal yang berbeda sebetulnya, jadi ketika pak Herbert bilang apakah ini akan maju, saya harus definisikan dulu ini, definisi majunya secara tv swasta atau definisi secara tv publik.

H : tapi kalo kita ikutin tv tv diluar kan ABC BBC mereka lebih bagus dari tv tv komersial malah, kemarin kita punya tamu dari ABC juga dari australia mereka malah punya pendapatan tidak dari APBN tapi dari merchandise, tapi mereka dari segi layar dari segi manajemen mereka bagus bagaimana tanggapan bapak

A : nah justru itu, anda harus melihat sejarahnya menurut saya ya, e kenapa sampai muncul tv publik, kalo gak salah ini, saya tahu dari orang lain juga nggak pernah baca, saya cuma pernah dengar dari orang ini. Tv publik itu karena kesadaran masyarakat bahwa mereka tuh selalu di kepung oleh televisi swasta di bohongi oleh tv swasta, sering masyarakat udah gak tau lagi media massa mana yang dipercaya mana yang nga gitu, karena mereka semuanya serba provokatif kan, masing-masing punya ambisinya sendiri, karena kita semua tau bad news is a good news kan, jadi mereka itu seperti kasus yang terakhir ini, kayak murdoch gitu kan itu mereka menghalalkan segala cara nih, sehingga masyarakat sadar nich kita perlu televisi yang bisa dipercaya, munculah tv publik, yang tidak komersial, tetapi ketika orang mencari mana yang paling benar tentang informasi itu dia lari ke tv publik, itu kalo di luar negeri. Mungkin itu juga yang menjiwai pendirian tv publik di Indonesia, jadi sekali lagi saya katakana kalo anda melihat tv swasta itu sebagai kompetitor bagi tvri tidak itu menurut saya tidak, karna beda tujuan, karena tujuan tv swasta itu udah jelas komersil, dia gak perduli apakah itu punya efek merusak bangsa atau gimana itu ya, mohon maaf, atau ada unsur provokatif atau menimbulkan keresahan dia gak perduli, anda lihat di tv swasta, seperti film tentang hantu lah, mengajarkan orang untuk berpikir tidak rasional ya. Atau kuis kuis yang sifatnya bagi-bagi hadiah sedemikian rupa, padahal gak make sense

kan, dengan mudah kok hadianya luar biasa banyak itu kan, nah itu gak mendidik, dari segi eh dari segi apa itu segi pendidikan itu gak mendidik sama sekali, tapi tvri tidak bisa seperti itu. Karna tvri tv publik, yang kita angkat itu budaya bangsa kita, memang bagi masyarakat yang populer sekarang itu gak menarik, contoh misalnya tatanan batak, itu kan menarik bagi orang batak gitu, gak mungkin bagi orang papua atau orang madura gitu atau sebaliknya. Padahal bangsa kita multi etnis kan. Tapi tv publik harus bisa mengangkat seperti itu karena itulah ciri bangsa kita

H : pak dari informasi wawancara saya dengan pak Hazairin Sitepu Ada sekitar untuk 2011 ini saja ada sekita kurang lebih 660 milyar pendapatan APBN kita. Pertanyaannya adalah, kalo bapak tadi bilang, kita gak bisa Kompetitor dengan tv komersial, itu dari segi pendapatan, maksud saya dari segi khalayak, tvri dapat dana pendapatan dari APBN dan juga Non APBN, tapi khalayaknya menurun itu maksud saya, jadi tidak ada produktivitas, bagaimana pengaturan keuangan untuk teman-teman produksi, untuk teman-teman yang bekerja di layar supaya menghasilkan layar yang baik, karena ini bukan hanya pasar keuangan saja, tapi khalayak itu harus direbut kan penonton tadi khalayak harus direbut

A : betul saya setuju, kalo bicara masalah diluas jangkauan penyiaran, itu juga berbicara tentang segmen pasar gitu kan, nah sekarang apakah tvri dicintai apa tidak oleh masyarakatnya itu soal lain kan. Nah sekarang ini harus dibuktikan dulu statement saudara nich, bahwa rating kita itu yang dibuat oleh lembaga-lembaga independen itu menunjukkan potensi kepada ditinggal masyarakat, itu harus dibuktikan dulu penelitiannya yah, karna saya pikir begini bisa jadi masyarakat kita kan ada masyarakat yang produktif dan yang tidak produktif, maksudnya begini masyarakat kelas yang lebih rendah, mungkin bagi tv swasta itu masyarakat di daerah terpencil itu gak menarik untuk mereka siarkan ditelevisi mereka, karena potensi daya belinya kurang. Apa gunanya mereka pasang iklan untuk mereka pasti mereka melihatnya daerah perkotaan terus ya mememang masyarakatnya punya daya beli yang tinggi. Nah tvri karena tidak komersial, mereka tidak peduli dengan apakah masyarakat ini terpencil atau tidak, karena tvri bertugas menjangkau seluruh lapisan masyarakat, karena motto kita, menjangkau masyarakat terpinggir dan tertinggal gitu lo. Membantu mereka juga, jadi saya yakinlah kalau anda bicara apakah tvri masih dicintai atau tidak, masih dicintai, buktinya faktanya hampir semua propinsi minta tvri untuk buka stasiun di tempat mereka, yang paling baru Sulawesi barat, sebelumnya mataram, gorontalo sama kendari. Itu benar menganggap tvri itu masih prestis bagi mereka, masih dicintai gitu. Itu di jogja, ada siaran televisi yang sifatnya ketoprak itu masih disukai, tinggi sekali ratingnya itu bagi mereka. Tapi ketika kita bicara masalah perkotaan, masyarakatnya hanya cari hiburan tok sesuatu yang sifatnya apa ya katakanlah eh kontroversi gitu lo, bombastis gitu mereka senang kan. Jadi gitu konteksnya beda gitu lo, jadi klo tvri ditinggalkan, buktikan dulu, faktanya malah sebaliknya, malah justru beberapa propinsi minta tvri buka stasiun di propinsi mereka, karena menurut mereka itu prestis. Kita prestisius gitu kan, kalo tv swasta mana ada daerah yang minta untuk dibuka, malah mereka bikin sendiri tv lokal. Misalnya tv swasta di Jakarta buka disini, gak ada tuh, tapi kalo tvri ia. Anda mungkin tahu bahwa baru dilantik kepsta Sulawesi barat, mamuju kan. Nah itu kalo tv swasta

gak menarik karena pangsa pasarnya nga potensial gituloh, tapi bagi tvri itu bukan persoalan. Karena misinya bukan itu, misinya bukan profit, melainkan menjangkau semua lapisan, nah perkara kemudian bahwa dananya dianggap belum mencukupi yah ilah, itu karena bisnis televisi itu adalah bisnis yang high technology. Berarti high investment, dan juga persoalan sdm kita juga. Sdm kita kan peninggalan jaman dulu ini pak. Ada pekerjaan yang jaman sekarang sudah bisa dikerjakan oleh satu orang, masih dikerjakan oleh 3 orang, itu karena masalah sdm, seperti itulah, kita masih padat karya, kalo tv swasta sekarang sudah canggih-canggih ya, satu kamera bisa dipakai buat nge-edit segala macam. Kita kan gak. Itu proses lah, karena kita lihat dari sis proyeksi pegawai tvri kan pada tahun 2012 ada pensiun besar. Karena emang sifat daripada pegawai di televisi ini habisnya seseorang normalnya adalah pensiun, gak bisa dipecat kayak tv swasta, kalo kita lihat di metro tv kan, itu penyiarinya dua tahun sekali pasti ganti pak. Karena news itu bahwa good looking dari penyiarinya juga harus menarik, nah kita sulit untuk itu, karena kita pns.

H : pak pengaturan segmen lagi, pengaturan APBN dan Non APBN bagaimana pak pengaturan untuk produksi, untuk penggunaan rutin tvri dan lain-lain.

A : oh itu udah sesuai dengan menteri keuangan lah, untuk operasional kita, pertama APBN itu digunakan untuk gaji pegawai, hampir 1/3 dari APBN dulu malah sampai setengahnya kita punya pegawai ada 6000 lebih se indonesia yang harus digaji setiap bulan, tambah lagi gaji tiga belas kan. Anda Bisa bayangkan itu sekitar 250 milyar lah.

H : itu rutin di pengeluaran di APBN tadi ya pak?

A : ia, dan juga belum lagi pegawai kontrak, nah mereka harus digaji juga. Nah itu dia termasuk untuk biaya produksi program.

H : jadi ada mix antara pendapatan APBN dan pendapatan Non APBN, sekarang udah digabungin aja yah.

A : tetap dipisah.

H : jadi pendapatan pengaturan keuangan berbeda tapi penggunaannya sama, atau non apbn untuk pegawai non kontrak atau untuk semuanya untuk produksi juga

A : nggak lah, klo produksi yang fix itu apbn semua.

H : kalo untuk streaming lah untuk program yang panjang

A : maksudnya kalo kita dapat untung dari kerjasama pihak ketiga ya untuk itu, itu gak bisa pake APBN kan,.

H : tapi kan ada sisa pak?

A : nah itu dia keuntungan, karena itu dua sisi. Penerimaannya 100 Milyar kan dipake lagi untuk produksinya.

H : 30% untuk produksinya kan?

A : 60% pak, kadang-kadang juga biaya penyewaan menara itu, kita share ke daerah 30%, karena kan menara itu di daerah. Itu kan perlu dipelihara, nah dari situ dananya. Itu dipake untuk membiayai hal yang lain yang tidak dibiayai hal-hal lain yang tidak cukupi oleh APBN.

H : misalnya walaupun tidak ada pp no 13, menyatakan bahwa tidak ada pendapatan diluar APBN, berarti tvri bisa miskin banget dong logikanya gitu,

pendapatan Non APBN misalnya tidak ada, apakah tvri akan selalu kekurangan. Yang saya tau sekarang masih kekurangan, atau sudah mencukupi.

A : ya kurang pasti, seperti yang saya bilang tadi ini high tech kan. Anda bisa lihat bahwa perlengkapan kita sudah dari jaman dulu, yang perlu dirawat dan perlu di re-invest sebetulnya. Tapi karena tidak ada dana, ya pelan-pelan lah, bertahap, kita tahu bahwa penerimaan negara Indonesia terbatas juga, pemerintah harus membiayai seluruh departemen di Negara ini. Tapi kan bagaimana kita lah, bagaimana kita memprioritaskan pembangunan tvri seperti pembangunan menara joglo kan

H : 2010 itupak ya kan.

A : nanti pelan-pelan kita perbaiki sesuai dengan dana alokasi dari pemerintah gitu. jadi mohon maaf, sekali lagi dana APBN itu jangan disebut pendapatan sebetulnya ya, itu dana alokasi pemerintah sebetulnya. Karena secara akunting kesannya beda karena secara akuntansi harus digunakan

H : jadi misalnya 660 milyar kita contoh misalnya 2011, kita masih kekurangan. Menurut pendapat bapak tadi, berapa sih yang cocok untuk tvri untuk 2011 ini saja pak

A : gak bisa secara akuntansi, seharusnya secara anggaran, itu tergantung apa yang kita kerjakan, itu kemarin kita ajukan 1.3 trilyun, mungkin segitulah yang pas menurut para petinggi itu, itu pun udah disesuaikan dengan berbagai hal. Ia kan. Misalnya kayak operasi kendaraan, perawatan, trus biaya transmisi, itu kan paling berat disitu kan, biaya siaran juga

H : pak biaya 660 milyar anggaran yang di bebaskan oleh pemerintah itu di sharekan lagi ke daerah?

A : oh ia dong

H : berapa persen pak? Dibagi seluruhnya? Secara merata, atau dibagi secara klas-klas itu juga

A : yah kelas itu pengaruh juga, nah kita kan daerah mengajukan ke pusat, misalnya bandung 30 Milyar gitu, tapi kita liat juga nich meneteri keuangan apa pas atau tidak. Jadi itu untuk TVRI se Indonesia

H : jadi kalau untuk pusat aja, kira-kira berapa pak?

A : tahun ini saya gak tau, tapi tahun lalu sekitar 300 Milyar. sekarang gini, kenapa lebih gede, karena kita siaran 22 jam daerah hanya sekitar 5 jam jd taro lah 6 jam berarti itu kita 18 jam gitu loh untuk se-indonesia mereka hanya mikirin 4 jam lokal

H : trus bagaimana pendapatan Non APBN di tvri, itu apakah ada peningkatan atau tidak.

A : eh..itu naik turun. Saya gak bisa bilang bahwa ini trendnya itu naik atau turun itu situasional. Kayak 2008 meningkat karena ada pemilu menjelang pemilu itu pasti meningkat lah

H : secara global meningkat terus waktu saya wawancara dengan pak Hazairin Sitepu. Menurut beliau secara global itu meningkat terus pak tidak ada naik turun pak

A : oh nga mungkin lah saya juga belum tentu secara past tp logika saya trend naik mungkin naik, tapi kalo factor secara nilai rupiah, itu fluktuatif lah. Ini kan

sangat dipengaruhi oleh even yah, situasional, ini udah pasti naik kayak waktu taun 2009 pemilu, itu udah pasti naik, lewat dari itu udah pasti turun lah.

H : bener-bener, itu partai gerindra aja hampir 6 milyar. Kalo tidak salah

A : tapi kita juga maksimum itu, karena apa, kita juga dibatasi, karena iklan itu hanya 15% kan, itu pun sebagiannya harus PSA. Jadi udah bisa ketebaklah. Gak mungkin jadi sampai 1 trilyun nga mungkin. Karena dijual itu hanya 7,5% slotnya hanya segitu ini kan terbatas, dibatasi oleh aturan. Kenapa tvri itu tidak sepopuler tv swasta kayak acaranya ya nga bisalah, karena kita tidak boleh menyiarkan berita gossip, tidak boleh menyiarkan berita kekerasan, kita tidak boleh menyiarkan, atau film yang tidak ada nilainya tidak boleh menyiarkan perempuan diatas dengkul contoh nga mungkin kita memutar film rambo tok, kayak fil yang lagi rame film ransformer gitu, atau harry potter, kita gak bisa muter karena itu tidak ada nilai kepublikannya. Jadi ya begitulah aturannya, karena kita tidak bisa cari untung.

H : pak bagaimana tanggapan bapak tentang pimpinan, apakah ada dampak dewan pegawai, dan direktur itu bekerja dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik secara pendapatan pak.

A : maksud saya gini, kok kita harus orientasinya pendapatan, harusnya itu bukan ukurannya.. itu meningkat kok, tahun 2006 itu cuma 250milyar. dan naik, artinya kan direksi kita mampu memberikan argument yang kuat,. Kalo dibilang kinerjanya ya faktanya begitu kok. Dengan kata lain joglo juga berdiri misalnya bahwa masyarakat disekitar mendukung tapi kan masyarakat sekitarnya. Karena sekarang informasi gak sama dulu lagi.

H : kalo kita lihat tv digital MNC sudh punya program TV digital pak sebetul tvri ada tv digital, kalo kita lihat itu indovision itu udah banyak program.

A : kita duluan lah jamannya pak yusuf kalla, cuman apa gunanya kita bikin tv digital, apabila masyarakat tidak punya tv digital. Harus bertahap lah, tugas menkominfo lah.

H : kalo secara anggaran tvri ini berdiri sendiri atau dibawah naungan Depkominfo.

A : kita gak dibawah depkominfo jangan salah, kita dibawah departemen keuangan pak. Jangan salah, hanya pegawainya dibawah pembinaan kominfo. Jadi secara prinsip tvri itu independen

H : jadi tidak ada intervensi dari Depkominfo dari segi anggarannya beda pak?

A : tidak ada tidak ada sama sekali beda, kita dibawah menteri keuangan, meskipun saya dengar isu mau dirubah tahun 2012 ya mau diganti tetapi sampai saat ini masih seperti dulu

H : mau diganti seperti apa pak?

A : Kita direncanakan mau punya mata anggaran sendiri lah tidak dibawah menteri keuangan tidak dibawah. Kan TVRI dan RRI itu sebagai lembaga penyiaran publik itu selama ini (terputus)

H : eee, kalo kita melihat pendapatan Non APBN tadi bapak bilang pengaturannya beda, bagaimana melihat pengaturannya terhadap kesejahteraan pegawainya.

A : maksudnya apanya yang beda nich

H : maksudnya pengturannya kan pak eh sory eh apa sistem akuntansinya kan pak

A : basisnya aja

H : bagaimana untuk kesejahteraan pegawai TVRI pak apakah dari Dana APBN atau Non APBN

H : dua-duanya. Jadi gaji pokok dalam APBN, tapi tunjangan itu sebagian APBN sebagian Non APBN seperti gaji direksi misalnya itu Non APBN

H : kalo fungsi untuk fungsi produksi pak itu semuanya dari APBN atau Non APBN

A : diupayakan APBN karena APBN lebih pasti Non APBN itu tidak pasti, kita ajukan dulu ke negara dari situ kemudian kita cocok-cocokin pas-pasin lah untuk kebutuhan kita semampu-mampunya klo tidak cukup mudah-mudahan ada tambahan dari Non APBN

H : kalo kita liat pasar saat ini, TV lain sudah menggabungkan dengan satu Televisi dengan televisi lainnya seperti terakhir SCTV mau akuisisi dengan Indosiar bagaimana bapak melihat itu?

A : itu kan nggak mudah, karena sekarang ini industry mahal, dan menggunakan dana yang tidak terbatas, sangat mahal. sementara mungkin pendapatan televisi swasta, itu sangat tergantung pada situasi ekonomi nasional, dan global, sehingga mereka berpikir kembali untuk serius lagi, gimana supaya untung, karena mereka tujuannya adalah profit, jika tidak mendapatkan laba, mereka ganti format, merger lah atau dijual lah, atau gimana. memang hal tersebut berdampak disini. Karena sebelumnya ada juga, seperti lativi dijual ke bakrie menjadi tv one, kemudian juga tv7 dijual ke trans, menjadi trans7. Elshinta dijual, memang itu biasalah. Memang bisnis ini menarik tapi tidak gampang berbicara soal high technology kan. high investment.

H : menyangkut apbn, menurut bapak ada nggak intervensi dari anggota dewan, dpr terhadap anggaran yang diajukan oleh tvri. Atau ada proses tarik-menarik kepentingan dari dpr terhadap anggaran tvri pak.

A : yaa. Gimana ya, bukan tarik-menarik ya, tapi memang harus ke dpr, karena dia lembaga pengawas. Memang harus ke dpr.

H : maksudnya gini pak, dalam proses permintaan anggaran, anggota dpr, atau tvri menjanjikan sesuatu.

A : kalo itu saya jamin nggak. Saya pikir juga nggak menarik berapalah kita ini 600m juga baru sekarang.

H : atau interaksinya dalam bentuk lain, tidak dengan anggaran tapi transaksionalnya.

A : misalnya apa tuh?

H : misalnya dengan menaruh orang-orang sesuai dengan kepercayaan mereka gitu.

A : di?

H : di kepemimpinan tvri gitu.

A : apa ada?

H : nah makanya saya Tanya sama bapak gitu.

Mungkin dari segi intervensi politik ataupun partai mungkin mereka disana,

A : saya nggak tau, tapi saya liat direktur utamanya kan orang tvri, bukan orang partai kan, direktur keuangannya orang pemerintah dari bpkp, ketua umumnya tvri.

H : berarti tidak ada intervensi dong.

A : saya nggak tau ya, tapi indikasinya saya tidak melihat gitu.

H : dari anggaran juga nggak ada, berarti pure banget ya.

A : semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang ada gitu. Nggak tau untuk lain, yang saya liat nggak ada, dewas pun juga sama, dua orang tvri, yang tiga dari luar, yang pasti dari segi direksi, dari 6 itu 4 kan orang tvri semua pak.

A: jadi artinya bebas dari kepentingan politik ya. Tapi saya pikir kyaknya nggak, jadi naif banget ke partai-partai. Tapi saya nggak tau ya.

H : pure sama skali tvri adalah tv publik, tv masyarakat dan dipergunakan untuk melayani masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak ada intrik-intrik atau transaksional antara kepentingan.

A : cita-citanya seperti itu, faktanya seperti itu, jadi semuanya itu bisa kita nilai secara kasat mata.

H : kalau penyimpangan sdm di tvri bagaimana menurut bapak.

A : itu bagian umum ya, tapi maksudnya seperti apa ini?

H : karena gini pak, dari hasil wawancara saya sebelumnya, bilang bahwa kita telah memberikan banyak uang untuk memperbaiki layar, tapi tidak, dan saya ada bukti bahwa kita minta untuk melakukan, sesuatu yang baik untuk layar tapi mereka menggunakan aktris yang tidak baik. Ada hubungan dengan anggaran juga kan. Memberikan program anggaran untuk selamat pagi nusantara 100juta tapi, hasilnya tidak maksimal. Bagaimana anda melihat, apakah ada penyimpangan atau memang seperti itu pak.

A :saya nggak tau ya, karena itu dibagian program ya, ukurannya apa dulu, ya kalo ukurannya pake aktris terkenal lebih sukses, apa ia gitu? Jadi

H : atau karena itu butuh pengkajian lebih dalam

A : karena mendatangkan aktris tersebut kita kurang maksimal, tunggu dulu, oprah winfrey mendunia, jadi banyak factor. Jangan lupa juga kita terikat pada undang-undang, jadi nggak sembarangan kita ada standarnya juga, bukan kita bisa semaunya, jadi saya kira begitu sih, nggak serta-merta, dari segi nggak optimal itu dari publik, apakah kita pake artis top trus sukses, itu hal yang berbeda

REPUBLIC OF INDONESIA  
 (SATU) SET DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2006**  
**NOMOR : 0002.0/069-03.0/-/2006**

ami mengesahkan Alokasi Anggaran :

an / Lembaga : (069) BELANJA LAIN-LAIN  
 isasi : (03) BELANJA LAIN-LAIN  
 : (-) SELURUH PROPINSI  
 a Satker : (000000) TERLAMPIR  
 : Rp. 200.000.000.000 ( \*\*\*DUA RATUS MILYAR RUPIAH\*\*\* )

giatan-kegiatan sebagai berikut :

Nama Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan :  
 PELAYANAN UMUM  
 PELAYANAN UMUM PEMERINTAH LAINNYA  
 PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPERINTAHAN  
 KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN

Jumlah Uang  
 Rp. 200.000.000.000  
 Rp. 200.000.000.000  
 Rp. 200.000.000.000  
 Rp. 200.000.000.000

na Berasal :

Rp. 200.000.000.000  
 Rp. 0  
 Rp. 0  
 Rp. 0  
 Rp. 0

y/Hibah Luar Negeri

nan Luar Negeri

lanja untuk masing-masing kegiatan tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA terlampir. Pencairan dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di :

**Terlampir**

gesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan bagi KPPN. Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada  
 Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.  
 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006.

Jakarta, 31 Desember 2005

A. N. MENTERI KEUANGAN RI  
 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

  
 MULIA P. NASUTION

**LAMPIRAN : 1 (SATU) SET DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN  
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2007  
NOMOR : 0040.0/069-03.0/-72007**

Dengan ini kami mengesahkan Alokasi Anggaran :

- 1. Departemen / Lembaga : (069) BELANJA LAIN-LAIN
- 2. Unit Organisasi : (03) BELANJA LAIN-LAIN
- 3. Prodivisi : (01) DKJ JAKARTA
- 4. Kode/Nama Satker : (999088) KANTOR PUSAT TVRI

Sebesar : Rp. 118.716.524.000 ( \*\*\*SERATUS DELAPANBELAS MILYAR TUJUH RATUS ENAMBELAS JUTA LIMA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH\*\*\* )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan :			
01 PELAYANAN UMUM			
01.90 PELAYANAN UMUM LAINNYA			
01.90.02 PROGRAM PEMBIAYAAN LAIN-LAIN			
01.90.02.6405 PENGELUARAN LAIN-LAIN			
08 PARTISIPASI DAN BUDAYA			
08.03 PEMBINAAN PENERBITAN DAN PERTYARAN			
08.03.01 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA			
08.03.01.6418 KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN			

	Rp.	Jumlah Uang
	Rp.	58.716.524.000
	Rp.	58.716.524.000
	Rp.	58.716.524.000
	Rp.	60.000.000.000
	Rp.	60.000.000.000
	Rp.	60.000.000.000

Sumber Dana Berasal :

1. Rupiah Murni	Rp.	118.716.524.000
2. PNBP	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0
- Hibah	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0

Rincian belanja untuk masing-masing kegiatan tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA terlampir. Pencairan dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di :

1. JAKARTA 1 (01B) Rp. 118.716.524.000
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan bagi KPPN. Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007.

Jakarta, 31 Desember 2006  
A.N. MENTERI KEUANGAN RI  
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

  
HERRY PURNOMO  
NIP. 060046544

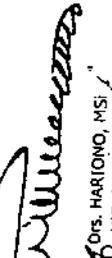
JAN 2007  
004-L

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2008  
NOMOR : 0009.2/069-03.0/-/2008  
IA. U M U M**

Embaga : (069) BELANJA LAIN-LAIN  
si : (03) BELANJA LAIN-LAIN  
 : (01) DKI JAKARTA  
 : (999088) KANTOR PUSAT TVRI

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. HARIO NO, MSI  
Bendahara Pengeluaran : JAKARIADI, SE  
Pejabat-Penyerbit SPM : DR. ANTAR.MT.SIANTUTI AK MBA

		Halaman : 1 A 1	
01	PELAYANAN UMUM		
01.90	PELAYANAN UMUM LAINNYA	Rp	157.212.852.000
01.90.02	PROGRAM PEMBIAYAAN LAIN-LAIN	Rp	157.212.852.000
		Rp	157.212.852.000
ran kegiatan :			
TERSELENGGARANYA PENYIARAN TELEVISI DENGAN BAIK			
aran Sub kegiatan :			
TERSELENGGARANYA PENYIARAN DENGAN BAIK			
TERSELENGGARANYA PELAKSANAAN ANGGARAN DENGAN BAIK			
TERBAYARNYA BEBAN LISTRIK, TELEPON DAN AIR			
TERBAYARNYA SEWA SATELIT DAN IURAN ORGANISASI			
TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN SOSIALISASI KEUANGAN			
TERSEDIAANYA JARINGAN TRANSMISI DI JOGLO JAKARTA			
TERAWATNYA GEDUNG DENGAN BAIK			
TERAWATNYA PERALATAN KANTOR			
TERAWATNYA PERALATAN Fungsional			
TERLAKSANYA ALAT PENGOLAH DATA			
TERSEDIAANYA ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI			
TERAWATNYA KENDARAAN RODA 4/6/10			
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN			
		Rp	157.212.852.000

  
 Jakarta, 2 Januari 2008  
 DIREKTUR UTAMA LPP TVRI  
  
 Drs. HARIO NO, MSI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 AMPARAN : 1 (SATU) SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
 TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR : 0105.0/999-06.1/-/2009

Dengan ini kami mengesahkan Alokasi Anggaran :

- 1. Kementerian / Lembaga : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA
- 2. Unit Organisasi : (06) PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI DAN LAIN-LAIN
- 3. Propinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode/Nama Satker : (999088) KANTOR PUSAT TVRI

Sebesar : Rp. 284.479.712.000 ( \*\*\*DUA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT MILYAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DUABELAS RIBU RUPIAH\*\*\* )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan : PELAYANAN UMUM	Rp.	Jumlah Uang
01	284.479.712.000	284.479.712.000
01.90	284.479.712.000	284.479.712.000
01.90.02	284.479.712.000	284.479.712.000
01.90.02.0115	284.479.712.000	284.479.712.000
KEGIATAN PEMBIAYAAN LAIN-LAIN		

Sumber Dana Berasal :

- 1. Rupiah Murni Rp. 284.479.712.000
- 2. PNBP Rp. 0
- 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0
- Hibah Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0

Rincian belanja untuk masing-masing kegiatan tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terlampir. Pencairan dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di :

- 1. JAKARTA I (018) Rp. 284.479.712.000 8.
- 2. 9.
- 3. 10.
- 4. 11.
- 5. 12.
- 6. 13.
- 7. 14.

Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan bagi KPPN. Tanggung Jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.  
 DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

Jakarta, 16 Januari 2009

A.N. MENTERI KEUANGAN RI

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN



HERRY PURNOMO  
 NIP. 060046544

**DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2011  
NOMOR : 0321/999-08.1.04/00/2011  
IA. U M U M**

Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Immas Sunarya, MM  
 Bendahara Pengeluaran : Jakarnadi, SE  
 Pejabat Penanda tangan SPM : DR. Anzar MT, Sianturi, Ak, MBA

Kementerian Negara/Lembaga : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA  
 Unit Organisasi : (08) PENGELOLAAN BELANJA LAJIN-LAJIN  
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
 Kode/Nama Satker : (999088) KANTOR PUSAT TVRI

Halaman : 1A.1

Kategori	Kode	Uraian	12,00 Bulan	Total
1 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM		367.813.240.000
Sub Fungsi	01.90	PELAYANAN UMUM LAINNYA		367.813.240.000
2 Program	999.08.12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya		367.813.240.000
Hasil (Outcome)		1. Terakutannya Pengelolaan Belanja Lainnya yang Efisien dan Kredibel		
		2. Tersusunnya LOPP Belanja Lainnya dengan Optimal Minimal WDP		
IKU Program	01	Tertibolannya dana Belanja Lainnya yang Efektif dan Akuntabel		
Kegiatan	02	Penatausahaan Transaksi Belanja Lainnya yang Tertib		
Indikator Kinerja Kegiatan	4070	Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Anggaran Lainnya		367.813.240.000
Keluaran (Output)	4070.03	Administrasi Perkantoran	12,00 Bulan	32.899.191.000
	4070.04	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan	12,00 Bulan	104.325.860.000
	4070.05	Peningkatan Kualitas SOM dan Tata Laksana	12,00 Bulan	5.449.828.000
	4070.06	Penyelenggaraan Saran	12,00 Bulan	174.534.045.000
	4070.07	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	12,00 Bulan	45.260.180.000
	4070.08	Promosi dan Publikasi LPP	12,00 Bulan	2.000.238.000
	4070.10	Pengawasan dan Peningkatan	12,00 Bulan	1.403.898.000
	4070.11	Pengajian dan Penelitian	12,00 Bulan	1.940.000.000

